

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Reformasi birokrasi telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan paradigma tentang pengelolaan keuangan di pemerintah daerah. Menurut Bangun (2009) ada tiga permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah yaitu ketidakefektifan, inefisiensi dan *privat inurement* (penggunaan dana untuk kepentingan individu). Hal ini disebabkan karena lemahnya mekanisme pengawasan dari pihak luar dan tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas seperti pada organisasi sektor privat. Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab akan membawa perubahan pada pola sistem pengawasan dan pemeriksaan keuangan di pemerintah daerah.

Sistem perubahan pola pengawasan terkait dengan diberinya kekuasaan kepada pemerintah daerah yaitu lembaga legislatif. Menurut Pramita (2010) fungsi dari lembaga legislatif adalah : (1) fungsi legislatif (membuat undang-undang) (2) fungsi anggaran (menyusun anggaran) (3) fungsi pengawasan (mengawasi kinerja eksekutif). Pemerintah daerah diharuskan bisa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan anggaran yang ada dalam anggaran pendapatan belanja daerah.

Penganggaran merupakan suatu proses yang cukup rumit pada organisasi sektor publik, termasuk di antaranya pemerintah daerah. Tahap

penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun oleh karena setiap daerah memerlukan anggaran sebagai acuan pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan, dimana anggaran dapat dijadikan ukuran atas keberhasilan dan keterbelangungannya rumah tangga keuangan daerah. Anggaran digunakan sebagai rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu.

Anggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat. Hal inilah yang menjadi perbedaan dengan anggaran sektor swasta karena tidak berhubungan dengan pengalokasian dana dari masyarakat. Pada sektor publik pendanaan organisasi berasal dari pajak, retribusi, laba perusahaan milik daerah atau negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Anggaran juga merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen keuangan daerah yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajemen dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Dengan di berlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, membawa perubahan fundamental dalam hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran daerah.

Mohamad dkk (2008) dalam Herlaksono (2010) menyatakan bahwa anggaran dalam organisasi sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai uang publik (*eksekutif*) kepada pemberi wewenang (*legislatif*) dapat terlihat dari anggaran. Kinerja manajer sektor publik akan dinilai berdasar pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran (Juliana, 2011).

Menurut Munawar (2006) anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat. Hal ini menjadikan perbedaan dengan anggaran sektor swasta karena tidak berhubungan dengan pengalokasian dana dari masyarakat. Pada sektor publik pendanaan organisasi berasal dari pajak dan retribusi, laba perusahaan milik daerah atau negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, serta sumber lain yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Kinerja manajerial merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan untuk menilai pengelolaan organisasi yang efektif. Komitmen organisasi sangat dibutuhkan sebagai penilaian kinerja karyawan. Karyawan dengan komitmen tinggi dapat diharapkan akan memperlihatkan kinerja yang optimal

(Rachmawati, 2009). Dalam penelitian Juliana (2011) Komitmen mencakup keterlibatan kerja, hal ini karena berhubungan dengan pekerjaan, menginvestasikan waktu, kemampuan dan energinya untuk pekerjaan, dan menganggap pekerjaan sebagai bagian utama dari hidupnya.

Penelitian Munaroh (2010) menyebutkan bahwa partisipasi manajer dalam penentuan anggaran mendorong para manajer untuk mengidentifikasi tujuan atau target menerima anggaran secara penuh dan melaksanakannya untuk mencapai target tersebut. Menurut Rahman (2003) dalam Munaroh (2010) untuk menyelesaikan perbedaan bisa dilakukan menggunakan pendekatan kontinjensi. Pendekatan ini secara sistematis mengevaluasi berbagai kondisi atau variabel yang dapat mempengaruhi hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan kinerja manajer.

Dalam evaluasi anggaran menunjuk pada perbedaan anggaran yang digunakan oleh pimpinan departemen dan digunakan dalam evaluasi kinerja mereka. Dalam Munawar (2006) Menemukan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah di kabupaten Kupang. Hal ini menunjukkan dalam menyusun anggaran selalu melakukan evaluasi kegiatan yang telah diprogramkan, supaya dalam penyusunan anggaran tidak terjadi kesalahan.

Dalam penyusunan anggaran memerlukan sasaran anggaran yang jelas agar memudahkan individu untuk mencapai target-target anggaran yang direncanakan. Selanjutnya target tersebut akan disusun sesuai dengan sasaran yang akan dicapai oleh organisasi. Sehingga tujuan anggaran yang spesifik

dan jelas itu dapat dimengerti oleh siapa yang bertanggung jawab. Juliana (2011) menyatakan sasaran tidak jelas dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan bagi para individu.

Pengendalian akuntansi adalah pengendalian yang menggunakan ukuran-ukuran keuangan salah satunya adalah anggaran. Anggaran digunakan sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja. Dengan demikian, anggaran merupakan alat bagi manajemen untuk menjalankan fungsi-fungsinya (Munandar, 2006 dalam Hartati, 2008). Tujuan dari adanya pengendalian akuntansi adalah untuk menjamin bahwa langkah-langkah akuntansi telah dilakukan dan tercapai integritas finansial dari aktivitas-aktivitas organisasi (Anna, dkk 2008 dalam Juliana, 2011).

Abdulah (2008) dalam Septiana (2010) menyatakan bahwa konteks otonomi daerah pendelegasian otoritas tanggung jawab kepada kepala daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawahnya paling sedikit dua hal penting apabila menerapkan system pengendalian akuntansi. Pertama mempercepat dan meningkatkan kualitas proses pengambilan yang dibuat oleh kepala SKPD. Kedua, penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan kepada kepala SKPD membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dan melakukan kontrol operasi-operasi dengan efektif dan efisien.

Pada dasarnya penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Juliana (2011). Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini

menambah variabel yaitu evaluasi anggaran dan objek penelitian yang berbeda yaitu di kabupaten Magelang.

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Komitmen Organisasi, Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial satuan Kerja Perangkat Daerah”** (studi empiris pada Pemerintah Daerah kabupaten Magelang).

B. RUMUSAN MASALAH

Atas dasar latar belakang dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah?
2. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah?
3. Apakah evaluasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah?
4. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah?
5. Apakah sistem pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menguji pengaruh positif komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.
2. Untuk menguji pengaruh positif partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.
3. Untuk menguji pengaruh positif evaluasi anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.
4. Untuk menguji pengaruh positif kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.
5. Untuk menguji pengaruh positif system pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.

D. MANFAAT HASIL PENELITIAN

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan adalah untuk menambah wawasan tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, evaluasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menyediakan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat dibidang praktik

Manfaat bagi pemerintah daerah dari penelitian ini adalah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan khususnya dibidang keuangan yang berhubungan dengan anggaran.